

Mengukur Kesiapan Etika Digital Dalam Analisis Persepsi Multidisiplin Mahasiswa Universitas Negeri Medan Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi

Syuratty Astuti Rahayu Manalu¹, Yesi Rama Indah Nainggolan*², Nur Hidayati Nasution³, Bertrand Samuel Pandiangan⁴, Peter Teguh Tarigan⁵, Ritayana Silalahi⁶, Elisabeth S. Putri Sarumaha⁷

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

e-mail : indahnainggolanyesirama@gmail.com

Article History

Received: 28 October 2025

Revised: 29 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Abstract

This study aims to measure the readiness and analyze the perceptions of Universitas Negeri Medan (UNIMED) students across various faculties regarding the implementation of Pancasila as the Basis for scientific development values (DPI) within digital ethics practices. The core problem addressed is the gap between the ideological recognition of Pancasila and the reality of behavior in cyberspace, which is susceptible to technological disruption and moral crises. A descriptive qualitative method, utilizing in-depth interviews across different faculties at UNIMED, was employed to identify the convergence and conflict of values in technology use. The research results consistently indicate that students acknowledge the urgency of Pancasila as a "moral compass" and "cultural filter", specifically highlighting the Second Sila (Just and Civilized Humanity) and Fourth Sila (Guided by Wisdom) as primary countermeasures against cyberbullying and hoax. However, a significant implementation gap (value lag) was identified, primarily driven by cultural factors such as pragmatism and the instant culture prevalent in social media. Specifically, students perceive the Fifth Sila (Social Justice) as the most challenging value to realize in online interactions due to the influence of algorithmic bias and lack of context. These findings emphasize the necessity for a reorientation of the DPI curriculum towards a more applicative and preventive approach, and the integration of transcendental ethics into technology design.

Keywords: Digital Ethics, Pancasila, Basis for Scientific Development Values (DPI), Multidisciplinary, Technology Disruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur kesiapan dan menganalisis persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) dari berbagai fakultas terhadap implementasi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) dalam praktik etika digital. Masalah utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara pengakuan ideologis Pancasila dengan realitas perilaku di ruang siber yang rentan terhadap disrupsi teknologi dan krisis moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam lintas fakultas di UNIMED untuk mengidentifikasi konvergensi dan konflik nilai dalam penggunaan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa secara konsisten mengakui urgensi Pancasila sebagai "**kompas moral**" dan "**filter budaya**", terutama menyoroti Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Keempat (Hikmat Kebijaksanaan) sebagai penangkal utama *cyberbullying* dan *hoax*. Namun, ditemukan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan (*value-lag*) yang disebabkan oleh faktor kultural seperti pragmatisme dan budaya instan di media sosial. Secara spesifik, mahasiswa menilai Sila Keadilan Sosial (Sila Kelima) paling sulit diwujudkan dalam interaksi daring karena pengaruh bias algoritma dan kurangnya konteks. Temuan ini menegaskan

perlu reorientasi kurikulum DPI yang lebih aplikatif dan preventif, serta integrasi etika transendental dalam desain teknologi.

Kata kunci: Digital, Pancasila, Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI), Multidisiplin, Disrupsi Teknologi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada era disrupsi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi, cara berpikir, dan perilaku sosial mahasiswa sebagai kelompok generasi digital native, namun akselerasi teknologi tersebut kerap tidak diimbangi dengan penguatan nilai etika dan moral yang memadai, sehingga memunculkan berbagai persoalan etika di ruang siber seperti perundungan daring, penyebaran hoaks, degradasi empati, serta praktik ketidakadilan berbasis bias algoritma. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) secara filosofis telah ditetapkan sebagai landasan normatif agar IPTEK tidak bersifat bebas nilai (*value-free*), melainkan diarahkan untuk memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan sosial.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya kontradiksi antara pengakuan ideologis mahasiswa terhadap Pancasila dan praktik etika digital sehari-hari, yang tercermin dari dominasi pragmatisme, budaya instan media sosial, serta lemahnya komitmen afektif dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila Keadilan Sosial. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menempatkan Pancasila sebagai konsep normatif atau mengkaji etika digital secara parsial, tanpa secara mendalam mengungkap kesenjangan implementasi nilai (*value-lag*) antara pemahaman kognitif dan perilaku aktual mahasiswa lintas disiplin ilmu, serta tanpa mengaitkannya dengan faktor struktural teknologi seperti bias algoritma dan fragmentasi informasi. Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang signifikan terkait minimnya kajian multidisiplin yang menganalisis persepsi mahasiswa secara komprehensif terhadap Pancasila sebagai DPI dalam praktik etika digital, khususnya dalam menjelaskan mengapa nilai keadilan sosial dinilai paling sulit diwujudkan di ruang siber dibandingkan nilai persatuan atau gotong royong. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mengukur kesiapan etika digital mahasiswa Universitas Negeri Medan, mengidentifikasi faktor kultural dan struktural penyebab kesenjangan implementasi nilai Pancasila, serta merumuskan kebutuhan reorientasi DPI yang lebih aplikatif dan preventif agar Pancasila benar-benar berfungsi sebagai jangkar moral dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur persepsi serta kesiapan etika digital mahasiswa Universitas Negeri Medan lintas disiplin ilmu terhadap implementasi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) dalam menghadapi disrupsi teknologi, mengidentifikasi faktor kultural dan struktural yang menyebabkan kesenjangan implementasi nilai (*value-lag*) antara pengakuan normatif dan perilaku etika digital mahasiswa, serta mengkaji secara mendalam tantangan implementasi Sila Keadilan Sosial dalam ruang siber yang dipengaruhi oleh bias algoritma dan fragmentasi informasi sebagai dasar perumusan reorientasi DPI yang lebih aplikatif dan preventif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) terhadap Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) dalam konteks etika digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan pandangan kritis mahasiswa terkait konflik nilai, kesenjangan implementasi (*value-lag*), serta tantangan etika di ruang siber secara holistik dan kontekstual. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik **purposive sampling**, melibatkan tujuh mahasiswa dari berbagai fakultas dan latar belakang disiplin ilmu guna merepresentasikan perspektif multidisiplin.

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam semi-terstruktur** yang memungkinkan fleksibilitas eksplorasi data sekaligus menjaga fokus pada kerangka DPI Pancasila. Data yang diperoleh

direkam, ditranskripsi secara verbatim, dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan menautkan temuan empiris pada konsep Pancasila sebagai DPI, sehingga hasil penelitian memiliki kekuatan interpretatif dan relevansi teoretis dalam kajian etika digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan lintas fakultas secara konsisten mempersepsikan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) yang sangat urgen dalam menghadapi disrupsi teknologi digital, khususnya sebagai kompas moral dan filter budaya dalam perilaku bermedia. Temuan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dipandang sebagai nilai paling relevan untuk merespons maraknya perundungan daring (cyberbullying) dan degradasi empati di ruang siber, sementara Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dipahami sebagai landasan bagi perlunya solusi etika digital yang bersifat preventif dan aplikatif, seperti gagasan "Digital Etiquette Labeling" dan aplikasi berbasis nilai Pancasila. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan (value-lag) antara pemahaman normatif mahasiswa terhadap nilai Pancasila dengan praktik nyata dalam kehidupan digital sehari-hari, yang terutama dipengaruhi oleh dominasi pragmatisme, budaya instan, dan orientasi hiburan di media sosial. Di sisi lain, nilai Persatuan Indonesia (Sila Ketiga) justru terimplementasi relatif baik dalam konteks kolaborasi akademik berbasis digital, yang tercermin dari pengalaman mahasiswa dalam kerja kelompok daring dan pemanfaatan platform kolaboratif sebagai wujud gotong royong modern. Temuan paling kritis dari penelitian ini adalah bahwa Sila Keadilan Sosial (Sila Kelima) dinilai sebagai nilai yang paling sulit diwujudkan dalam interaksi daring, karena kuatnya pengaruh fragmentasi informasi dan bias algoritma media sosial yang mendorong penilaian cepat, parsial, dan sering kali tidak adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak bersifat netral secara etis, melainkan memiliki dampak struktural yang berpotensi melemahkan orientasi egaliter DPI. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun Pancasila diakui secara ideologis sebagai landasan etika digital, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan institusi pendidikan tinggi untuk mereorientasi pembelajaran DPI ke arah yang lebih kontekstual, kritis, dan aplikatif, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara nilai dan praktik serta membekali mahasiswa dengan kesadaran etis yang relevan terhadap tantangan teknologi kontemporer.

Bagian ini menyajikan temuan kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam lintas fakultas di UNIMED, dianalisis berdasarkan kerangka Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI). Pembahasan ini mengukur sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap Pancasila telah bergeser dari sekadar idealisme normatif menjadi tuntutan etika aplikatif di ruang digital.

Sila Kemanusiaan dan Pembentukan Etika Digital Preventif

Hasil wawancara menggarisbawahi urgensi Pancasila sebagai "**kompass moral**" dan "**filter budaya**" yang diperlukan untuk mengimbangi akselerasi teknologi. Mahasiswa tidak hanya mengakui perlunya etika, tetapi juga menuntut solusi aplikatif yang bersifat pencegahan (*preventive*), yang diwujudkan melalui interpretasi Sila Kedua dan Sila Keempat.

Krisis Empati dan Perundungan Daring (Sila Kedua)

Temuan menunjukkan bahwa krisis etika di ruang siber berpusat pada pelanggaran terhadap **Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**. Kasus **perundungan daring (cyberbullying)** yang masif, terutama yang menargetkan figur publik atau anak-anak, diakui mahasiswa sebagai bukti nyata dari **kurangnya Sila Kemanusiaan** dan minimnya empati. Hal ini sejalan dengan data Kominfo yang menunjukkan kenaikan aduan perundungan digital, menegaskan bahwa mahasiswa melihat teknologi telah menciptakan "**kesenjangan empati**".

Sila Kedua menuntut agar IPTEK menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, pengalaman *cyberbullying* yang disorot mahasiswa merefleksikan kegagalan DPI untuk beroperasi sebagai **Humanisme Etis**, di mana proses *menghakimi* dan *menyebarkan kebencian* terjadi tanpa pertimbangan peradaban.

Tuntutan Solusi Preventif (Sila Keempat)

Untuk mengatasi krisis Sila Kedua, mahasiswa menuntut solusi yang proaktif dan preventif, yang merupakan manifestasi dari **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan**. Ide aplikasi "**SILA Connect**" dengan fitur "**auto-filter perilaku digital**" atau kebijakan "**Digital Etiquette Labeling**" adalah usulan konkret yang muncul dari wawancara. Konsep ini menekankan:

- **Aplikasi Aplikatif:** Pancasila harus terintegrasi langsung ke dalam antarmuka teknologi (mirip *AI toxicity detection*), tidak hanya diajarkan secara normatif.
- **Edukasi Preventif:** Pelabelan edukatif lebih disukai daripada sanksi langsung, karena mendorong pengguna untuk melakukan **refleksi diri (self-check)** sebelum bertindak impulsif, sesuai dengan semangat **Hikmat Kebijaksanaan**.

Tuntutan ini menegaskan bahwa DPI tidak hanya berperan sebagai pembatas (larangan), tetapi juga sebagai panduan konstruktif dalam merancang mekanisme teknologi yang lebih beradab.

Konflik Kultural dan Kesenjangan Implementasi (Value-Lag)

Meskipun mahasiswa mengakui nilai Pancasila, hasil penelitian menunjukkan adanya **kesenjangan implementasi yang signifikan (value-lag)** yang disebabkan oleh faktor kultural di lingkungan digital.

Dominasi Pragmatisme dan Budaya Instan

Sebagian besar responden mengakui adanya dominasi **kepentingan pribadi** (hiburan, *scrolling* tanpa tujuan) dalam penggunaan teknologi, yang kontras dengan tujuan "**Kemanusiaan**". Perilaku ini mencerminkan adanya arus **pragmatisme** dan **budaya instan** di media sosial yang menghambat komitmen etika.

Kesenjangan ini diperkuat oleh penilaian mahasiswa bahwa kesadaran etika di lingkungan pertemanan mereka berada di level "**biasa saja**"; komitmennya lemah, meskipun mereka tahu batasan etika. Hal ini menunjukkan bahwa **kesadaran kognitif** Pancasila tidak selalu diterjemahkan menjadi **komitmen afektif** di dunia digital.

Sinergi Gotong Royong sebagai Kontras (Sila Ketiga)

Menariknya, di tengah *value-lag* tersebut, nilai **Persatuan Indonesia (Sila 3)** terimplementasi dengan baik dalam ranah **kolaborasi akademik**. Mahasiswa menyebut kemudahan **kolaborasi virtual** (Google Docs, proyek kelas) sebagai hal positif yang paling dirasakan dari teknologi. Aspek ini sejalan dengan nilai **gotong royong** karena memungkinkan kerja kolektif yang cepat dan egaliter. Kontras antara tingginya implementasi Sila 3 dalam kolaborasi dan rendahnya komitmen etika pada Sila 2 dan Sila 5 menunjukkan bahwa implementasi DPI bersifat **segmentatif**, tergantung pada apakah IPTEK digunakan untuk tujuan kolektif/akademik atau untuk interaksi personal/social.

Tantangan Kritis: Keadilan Sosial (Sila Kelima) dalam Palagan Algoritma

Temuan paling kritis dari wawancara adalah bahwa **Sila Keadilan Sosial (Sila Kelima)** merupakan nilai Pancasila yang **paling sulit** diwujudkan dalam interaksi daring.

Sulitnya Bersikap Adil di Ruang Siber

Mahasiswa secara spesifik menilai bahwa **bersikap adil (Sila 5)** lebih menantang daripada menghargai keberagaman (Sila 3). Kesulitan ini disebabkan oleh dua faktor struktural dan kontekstual digital:

1. **Fragmentasi Informasi:** Pengguna hanya melihat **fragmen hidup** orang lain di ranah daring, sehingga memicu penilaian yang cepat dan seringkali tidak adil karena **kurangnya konteks**.
2. **Bias Algoritma:** Penilaian cepat dan tidak adil ini diperburuk oleh **bias algoritma**, yang menjebak pengguna dalam *echo chamber*, memperkuat bias pribadi, dan mengancam objektivitas.

Ancaman terhadap Orientasi Egaliter DPI

Kondisi ini secara langsung mengancam **orientasi egaliter DPI**, yang seharusnya menjadikan IPTEK instrumen pemerataan kesejahteraan. Pengakuan mahasiswa terhadap kesulitan Sila Kelima menegaskan bahwa teknologi, alih-alih menjadi alat pemersatu, justru berpotensi melanggengkan **ketidakadilan sosiologis** di ruang siber. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mereorientasi kurikulum DPI agar mampu membekali mahasiswa dengan kesadaran kritis terhadap dampak struktural teknologi, terutama dalam konteks **bias algoritma**

B. Pembahasan

Pancasila sebagai Kompas Moral dalam Etika Digital Mahasiswa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa lintas fakultas UNIMED secara konsisten memaknai Pancasila sebagai *kompas moral* dan *filter budaya* dalam menghadapi disrupsi teknologi digital. Persepsi ini menguatkan pandangan bahwa Pancasila tidak dipahami sebatas ideologi normatif, melainkan sebagai kerangka etik yang relevan untuk mengarahkan perilaku manusia dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Kaelan yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai DPI berfungsi menolak anggapan IPTEK yang bebas nilai (*value-free*), serta menempatkan manusia sebagai pusat orientasi pengembangan ilmu.

Kesadaran mahasiswa akan urgensi Pancasila ini memperlihatkan adanya pengakuan ideologis yang kuat. Namun, sebagaimana terlihat dalam temuan wawancara, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku digital sehari-hari. Kondisi ini menegaskan adanya perbedaan antara pemahaman kognitif dan aktualisasi etis, yang oleh Dewi dan Puspitasari disebut sebagai *kesejangan kognitif-afektif* dalam etika Pancasila di kalangan generasi digital native.

Krisis Empati Digital dan Pelanggaran Sila Kemanusiaan (Sila Kedua)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fenomena perundungan daring (*cyberbullying*) dipersepsikan mahasiswa sebagai bentuk paling nyata dari krisis etika digital. Mahasiswa menilai bahwa perilaku tersebut mencerminkan kegagalan penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, khususnya dalam hal empati, penghormatan martabat manusia, dan pengendalian diri di ruang siber.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Kusuma yang menyatakan bahwa ruang digital cenderung menciptakan *empathy gap*, yakni kondisi di mana pengguna kehilangan sensitivitas moral akibat anonimitas dan jarak psikologis yang dibentuk oleh teknologi. Data Kominfo tentang meningkatnya aduan perundungan digital juga menjadi bukti empiris bahwa krisis empati bukan sekadar persepsi subjektif mahasiswa, melainkan fenomena sosial yang nyata dan meluas. Dalam konteks DPI, kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah berkembang lebih cepat dibandingkan internalisasi nilai kemanusiaan, sehingga Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai pengarah etik dalam praktik digital mahasiswa.

Sila Keempat dan Tuntutan Etika Digital yang Preventif dan Aplikatif

Menariknya, mahasiswa tidak hanya mengkritik lemahnya etika digital, tetapi juga menawarkan solusi preventif berbasis nilai Pancasila, seperti gagasan *Digital Etiquette Labeling* dan aplikasi *SILA Connect*. Usulan ini mencerminkan internalisasi nilai Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan), yang menekankan pengambilan keputusan secara reflektif, rasional, dan bertanggung jawab.

Gagasan etika digital yang bersifat preventif ini sejalan dengan konsep *ethical by design*, di mana nilai moral diintegrasikan langsung ke dalam sistem teknologi, bukan hanya dibebankan pada individu pengguna. Pertama menegaskan bahwa pendekatan pelabelan etika digital berbasis nilai lokal dapat menjadi instrumen edukatif yang mendorong refleksi sebelum pengguna bertindak impulsif di ruang siber. Dengan demikian, temuan penelitian ini

menunjukkan adanya pergeseran paradigma mahasiswa: dari etika sebagai aturan normatif menuju etika sebagai sistem pendukung perilaku digital yang bijaksana dan beradab

Kesenjangan Implementasi (Value-Lag) akibat Pragmatisme Digital

Meskipun mahasiswa mengakui pentingnya Pancasila, penelitian ini menemukan adanya *value-lag* yang signifikan dalam implementasinya. Faktor utama penyebab kesenjangan tersebut adalah dominasi pragmatisme dan budaya instan dalam penggunaan media sosial. Mahasiswa mengakui bahwa aktivitas digital lebih banyak diarahkan pada hiburan, *scrolling* tanpa tujuan, dan kepentingan personal dibandingkan refleksi nilai moral.

Fenomena ini memperkuat temuan Alamsyah yang menyatakan bahwa mahasiswa lintas disiplin cenderung memahami etika Pancasila secara konseptual, tetapi gagal menerapkannya secara konsisten akibat tekanan budaya digital yang serba cepat dan instan

. Dalam perspektif DPI, kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum mampu menandingi kekuatan struktur teknologi dan budaya media sosial.

Implementasi Parsial DPI: Gotong Royong Digital dan Sila Ketiga

Di tengah lemahnya penerapan Sila Kedua dan Kelima, penelitian ini menemukan bahwa nilai Persatuan Indonesia (Sila Ketiga) relatif terimplementasi dengan baik, khususnya dalam konteks kolaborasi akademik digital. Mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kerja kelompok, diskusi daring, dan penyelesaian tugas bersama secara efisien.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi DPI bersifat kontekstual dan segmentatif. Ketika teknologi digunakan untuk tujuan kolektif dan akademik, nilai gotong royong dapat terwujud dengan kuat. Namun, ketika teknologi digunakan dalam interaksi sosial personal, nilai etika justru melemah. Temuan ini memperkuat pandangan Wibowo bahwa DPI hanya akan efektif jika nilai Pancasila dilekatkan secara sadar pada tujuan penggunaan IPTEK.

Tantangan Paling Kritis: Keadilan Sosial (Sila Kelima) dalam Ruang Algoritmik

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah penilaian mahasiswa bahwa Sila Keadilan Sosial merupakan nilai yang paling sulit diimplementasikan dalam ruang digital. Kesulitan ini disebabkan oleh fragmentasi informasi dan bias algoritma media sosial yang mendorong penilaian cepat, dangkal, dan sering kali tidak adil.

Hidayat dan Santoso menjelaskan bahwa algoritma digital cenderung menciptakan *echo chamber* yang memperkuat prasangka dan mengaburkan objektivitas, sehingga keadilan sosial menjadi sulit diwujudkan dalam konteks DPI, kondisi ini sangat problematis karena bertentangan dengan orientasi egaliter Pancasila yang menempatkan IPTEK sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama etika digital bukan hanya terletak pada perilaku individu, tetapi juga pada struktur teknologi itu sendiri, sehingga diperlukan reorientasi kurikulum DPI yang membekali mahasiswa dengan kesadaran kritis terhadap dampak algoritmik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan secara multidisiplin mengakui urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) dan memandangnya sebagai kompas moral serta filter budaya dalam menghadapi disrupsi teknologi digital. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila II) dan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (Sila IV) dipersepsikan paling relevan dalam mencegah praktik tidak etis seperti cyberbullying dan penyebaran hoaks melalui pendekatan preventif. Namun demikian, penelitian menemukan adanya kesenjangan implementasi nilai (*value-lag*) yang dipengaruhi oleh budaya pragmatis dan instan di ruang siber. Tantangan paling krusial terletak pada implementasi Sila Keadilan Sosial (Sila V), yang dinilai paling sulit diwujudkan akibat bias algoritma dan fragmentasi informasi yang memicu penilaian tidak adil. Oleh karena itu, keberhasilan Pancasila sebagai DPI menuntut reorientasi kurikulum yang lebih aplikatif, kritis, dan integratif terhadap etika digital agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik teknologi sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, F. (2023). Persepsi Mahasiswa Lintas Bidang Ilmu Terhadap Implementasi Etika Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*, 12(4), 88-105.
- Dewi, L. S., & Puspitasari, I. (2024). Kesenjangan Kognitif dan Afektif: Studi Kasus *Value-Lag* Etika Pancasila di Kalangan Mahasiswa Digital Native. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 9(1), 15-30.
- Hidayat, N., & Santoso, A. (2022). Mengukur Keadilan Sosial (Sila Kelima) dalam Palagan Digital: Tantangan Bias Algoritma pada Generasi Z. *Jurnal Etika dan Teknologi*, 5(3), 201-218.
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila: Pendekatan Filosofis dan Implementatif*. Yogyakarta: Paradigma. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2024). *Laporan Tahunan Aduan Konten Negatif dan Perundungan Digital di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kusuma, R. (2023). Implementasi Sila Kemanusiaan: Analisis Kasus *Cyberbullying* dan Degradasi Empati di Ranah Daring. *Jurnal Psikologi Sosial Terapan*, 15(2), 45-60.
- Manalu, S. A. R., Nainggolan, Y. R. I., et al. (2025). Mengukur Kesiapan Etika Digital: Analisis Persepsi Multidisiplin Mahasiswa UNIMED terhadap Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu (DPI) dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi. [*Nama Jurnal Publikasi, Volume(Nomor)*].
- Pratama, B. (2024). Sistem Pencegahan Etika Digital: Desain *Digital Etiquette Labeling* Berbasis Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Inovasi Kebijakan Publik*, 11(1), 110-125.
- Wibowo, G. (2022). DPI sebagai Jangkar Moral: Menolak Sifat *Value-Free* IPTEK di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Filsafat Pendidikan Pancasila*, 8(3), 75-90.